

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

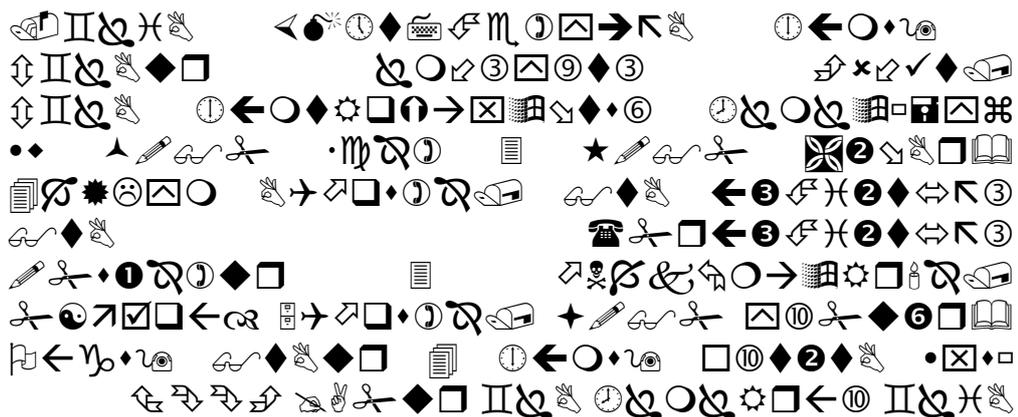
Pendidikan telah memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap kemajuan suatu bangsa dan merupakan sebagai wahana dalam menerjemahkan pesan-pesan konstitusi serta sarana dalam membangun watak bangsa. Menyadari akan hal ini, pemerintah melakukan perubahan dan penyempurnaan pengelolaan pendidikan dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Penerepan desentralisasi ke dalam manajemen pendidikan menghadirkan sekolah sebagai suatu lembaga yang memiliki otoritas dan kewenangan yang tidak lagi tergantung kepada kebijakan dan birokrasi pemerintah. Dengan konsep desentralisasi, sekolah memiliki kemandirian untuk mengelola lembaganya melalui Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).

Konsep MBS pertama kali muncul di Amerika Serikat. Latar belakangnya ketika itu masyarakat mempertanyakan tentang relevansi dan korelasi pendidikan yang diselenggarakan di sekolah dengan tuntutan kebutuhan masyarakat. Kinerja sekolah pada saat itu dianggap tidak sesuai dengan tuntutan peserta didik untuk terjun ke dunia usaha dan sekolah dianggap tidak mampu memberikan hasil dalam konteks kehidupan ekonomi kompetitif secara global.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Syaiful Sagala, *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan: Pembuka Ruang Kreativitas, Inovasi dan Pemberdayaan Potensi Sekolah dalam Sistem Otonomi Sekolah* (Bandung: Alfabeta, 2013),153.

Fenomena tersebut segera diantisipasi dengan melakukan upaya perubahan manajemen sekolah. Masyarakat, dan pemerintah sepakat melakukan reformasi terhadap manajemen sekolah. Bertitik tolak dari kondisi tersebut, dipandang perlu membangun suatu sistem persekolahan yang mampu memberikan kemampuan dasar (*basic skill*) bagi peserta didik. Muncullah penataan sekolah melalui konsep MBS yang diartikan sebagai wujud dari reformasi pendidikan yang meredesain dan memodifikasi srtuktur pemerintah ke sekolah dengan pemberdayaan sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional.<sup>2</sup> Usaha untuk memperbaiki suatu otonomi pendidikan menjadi yang lebih baik tentu menjadi harapan semua orang untuk meningkatnya suatu kualitas pendidikan nasional. Allah ‘Azza wa Jalla juga membicarakan tentang perubahan dimana Allah tidak akan merubah keadaan mereka, selama mereka tidak merobah sebab-sebab kemunduran mereka. Maksud tersebut tertuang dalam surat Ar-Ra’ad: ayat 11:



*Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila*

<sup>2</sup>Ibid.,

*Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.*<sup>3</sup>

Pelaksanaan manajemen sekolah yang efektif dan efisien menuntut pelaksanaan manajemen secara terpadu dan terintegrasi dalam pengelolaan bidang-bidang kegiatan manajemen pendidikan, melalui manajemen sekolah yang efektif dan efisien tersebut, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan.<sup>4</sup>

Manajemen pendidikan merupakan alternatif strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan bahwa manajemen sekolah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan, manajemen sekolah secara langsung akan mempengaruhi belajar, waktu mengajar dan proses pembelajaran.<sup>5</sup>

Pengembangan, peningkatan dan perbaikan pendidikan harus dilakukan secara holistik dan simultan, tidak boleh parsial walaupun mungkin dilakukan bertahap, perbaikan sektor kurikulum, tenaga guru dan fasilitas serta sarana pembelajaran, tidak akan terlalu membawa perubahan signifikan jika tidak disertai dengan perbaikan pola dan kultur manajemen yang mendukung perubahan-perubahan tersebut.

Dinamika guru dalam pengembangan program pembelajaran tidak akan bermakna bagi perbaikan proses dan hasil belajar siswa, jika manajemen sekolahnya tidak memberikan peluang tumbuh dan berkembangnya kreatifitas

---

<sup>3</sup> Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia: Ayat Pojok Juz 11-20 (Kudus: Menara Kudus, 2006),250.

<sup>4</sup> E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep Strategi dan Implementasi* (Bandung: Rosdakarya, 2005), 21.

<sup>5</sup> *Ibid*, 21- 22.

guru tersebut.<sup>6</sup> Media pembelajaran yang bisa mendukung dalam proses belajar mengajar siswa, misal layar LCD dan alat peraga akan tidak bermakna apabila manajemen sekolahnya tidak memberi perhatian yang maksimal dalam peningkatan optimalisasi media pembelajaran tersebut dalam proses belajar mengajar siswa. Manajemen memang merupakan sesuatu yang amat bermakna dalam perubahan menuju sebuah perbaikan.

Perubahan yang terjadi pada gilirannya akan mempengaruhi tata nilai kehidupan masyarakat yang mungkin sama sekali baru dan berbeda dengan gaya nilai yang sekarang dianut masyarakat, proses perubahan kesiapan lembaga-lembaga pendidikan dan institusi sosial lainnya menjadi sangat penting, sebab masyarakat yang berada pada proses transisi kultural sangat labil pada berbagai benturan nilai dan salah satunya adalah institusi sosial dan kultural yang diharapkan dapat berperan besar dalam mengatur irama perubahan tersebut adalah lembaga pendidikan.<sup>7</sup>

Pengembangan secara normatif serta pemahaman akan potensi dan tuntutan lingkungan strategis, sangat diperlukan sebagai dasar pengembangan pendidikan di madrasah yang secara konseptual akan dapat diterima oleh logika, secara kultural sesuai dengan budaya bangsa dan secara politis dapat diterima oleh masyarakat.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Dede Rosyada, *Paradikma Pendidikan Demokratis: Sebuah Model Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan* (Jakarta, Kencana, 2004), 225.

<sup>7</sup> Abdul Rochman Sholeh, *Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa: Visi Misi dan Aksi* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), 129

<sup>8</sup> Tim Departemen Agama RI, *Desain Pengembangan Madrasah* (Jakarta : Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2004), 10 - 11

Pengaruh masyarakat terhadap sekolah sebagai lembaga sosial, terasa amat kuat, dan pengaruh pula kepada para individu-individu yang ada dalam lingkungan sekolah, lingkungan dimana sekolah berada, merupakan masyarakat yang bersifat kompleks, terdiri dari berbagai macam tingkatan masyarakat yang saling melengkapi (*over lapping*), dan bersifat unik sebagai akibat latar belakang dimensi budaya yang beraneka ragam.<sup>9</sup>

Tindakan sistem pendidikan nasional diantaranya pendidikan peserta didik, tujuan pendidikan, relasi pendidikan dan struktur sosio kultural, merupakan unsur-unsur yang harus diatur dan dikendalikan secara definitif dan bersifat formal, sesuai dengan aspek-aspek nasionalisme dalam lingkungan bangsa Indonesia. Tindakan pendidikan yang berlangsung dalam situasi pendidikan berdasarkan sistem universal di bidang pendidikan yang memiliki sekurang-kurangnya 5 (lima) unsur, yang terdapat juga di lingkungan pendidikan yang dilembagakan sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional.<sup>10</sup>

Kelima unsur yang disebutkan diatas merupakan unsur-unsur yang harus diatur dan dikendalikan secara definitif dan bersifat formal, sesuai dengan aspek-aspek nasionalisme dalam kehidupan bangsa Indonesia. Dalam pelebagaan inilah terentuk berbagai jenis organisasi kerja yang memerlukan kegiatan manajemen, agar sebagai proses kerja sama (organisasi dalam arti

---

<sup>9</sup> Wahjosumidjo, *Kepemimpinan Kepala Sekolah, Tinjauan Teoritik dan Permasalahannya*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002), 331

<sup>10</sup> Hadari Nawawi, *Manajemen Strategis*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003), 17.

dinamis) dapat mencapai tujuan pendidikan nasional secara efektif dan efisien.<sup>11</sup>

Manajemen pendidikan nasional secara keseluruhan masih bersifat sentralistik sehingga kurang mendorong terjadinya demokratisasi dan desentralisasi penyelenggaraan pendidikan. Selain pemberian otonomi yang lebih besar pada sekolah dan pemerintah daerah dalam pengelolaan pendidikan, manajemen berbasis sekolah juga bertujuan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan semua *stakeholder* pendidikan di sekolah, sehingga tercipta *sense of belonging* (rasa memiliki) dari mereka untuk mewujudkan pola baru manajemen pendidikan masa depan yang lebih bernuansa otonomi dan yang lebih demokratis, dan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam bidang pendidikan, maka diperlukan wadah yang dapat mengakomodasi pandangan, aspirasi, dan yang mampu menggali potensi masyarakat untuk menjamin demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas pendidikan. Salah satu wadah tersebut adalah dibentuknya dewan pendidikan di tingkat kabupaten/kota dan komite sekolah di tingkat satuan pendidikan.

Dalam UU No 25/2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas), komite sekolah merupakan amanat rakyat. Amanat ini selaras dengan kebijakan otonomi daerah yang telah memposisikan kabupaten atau kota sebagai pemegang kewenangan yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pendidikan, bahkan dalam beberapa hal penyelenggaraan

---

<sup>11</sup>*Ibid.*,

pendidikan telah diberikan pada satuan pendidikan. Dengan kata lain keberhasilan penyelenggaraan pendidikan tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah pusat melainkan juga pemerintah provinsi, kabupaten, pihak sekolah, orang tua dan masyarakat atau *stakeholder*.

Hal ini sesuai dengan konsep partisipasi berbasis masyarakat (*community based participation*) dan manajemen berbasis sekolah (*school based management*) yang kini tidak hanya menjadi wacana tetapi mulai dilaksanakan di Indonesia.<sup>12</sup> Era reformasi telah membawa banyak perubahan kebijakan dasar di berbagai bidang kehidupan. Lahirnya UU No 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan UU No 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah membawa konsekuensi terhadap bidang-bidang kewenangan daerah sehingga lebih otonom termasuk didalamnya pada bidang pendidikan. Keinginan pemerintah agar pengelolaan pendidikan diarahkan pada desentralisasi menuntut partisipasi masyarakat secara aktif untuk merealisasikan otonomi daerah. Otonomi pendidikan yang dikelola secara terpusat harus dirubah untuk mengikuti irama yang sedang berkembang sehingga otonomi daerah sebagai kebijakan politik di tingkat makro akan memberi imbas terhadap otonomi sekolah.

Kegiatan perencanaan pendidikan dan kegiatan pendidikan tidak pernah terlepas dari masyarakat sekitarnya, sebab ada hubungan saling memberi, saling mendukung dan saling menguntungkan antara lembaga

---

<sup>12</sup> E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep, Strategi, dan Implementasi ...*,15.

pendidikan dan masyarakat.<sup>13</sup> Hal ini juga mengharapkan masyarakat agar ikut serta bertanggung jawab terhadap kemajuan dan kelancaran proses pendidikan dalam lembaga, sedangkan lembaga pendidikan juga diharapkan dapat bekerjasama secara erat dengan masyarakat. Konsekuensi dari hubungan tersebut adalah mengakomodasikan aspirasi, harapan dan kebutuhan *stakeholder* sekolah sehingga perlu dikembangkan suatu wadah untuk menampung dan menyalurkannya, yaitu di dalam wadah komite sekolah.

Pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No 044/4/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Komite dan Dewan Sekolah. Keputusan tersebut merupakan payung hukum bagi pembentukan komite sekolah di tiap satuan sekolah secara nasional. Sebenarnya jika dilihat dari sejarah sekolah, masyarakat telah berperan penting dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan antara lain dengan terbentuknya persatuan orang tua wali murid atau POMG, setelah itu mengalami peningkatan dengan dimunculkannya Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3) dan pada dekade yang sama dibentuk pula komite pendidikan di beberapa sekolah yang memiliki program khusus.<sup>14</sup>

Semenjak dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang dewan pendidikan dan komite sekolah, dapat dikatakan hampir semua sekolah telah memiliki komite

---

<sup>13</sup> M. pidarta, *Perencanaan Pendidikan Partisipasi dengan Pendekatan Sistem*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1990),18.

<sup>14</sup> Salladien, *Komite Sekolah dan Kaitannya dengan Implementasi KBK.Makalah Seminar(7 Juli 2004). Fakultas MIPA ( Malang: Universitas Negeri Malang, 2004)*, 19.

sekolah yang mewakili masyarakat untuk mengakomodasi aspirasi, harapan dan kebutuhan stakeholder sekolah. Dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan salah satu misi pendidikan adalah memberdayakan peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kemudian masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah. Komite sekolah merupakan badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan Sekolah, maupun jalur pendidikan luar Sekolah. Komite Sekolah yang berkedudukan di setiap satuan pendidikan merupakan badan mandiri yang tidak memiliki hubungan hierarkis dengan lembaga pemerintahan. Dalam penyelenggaraan pendidikan, komite sekolah turut berkontribusi dalam memanfaatkan potensi yang ada, sehingga semua potensi itu dikembangkan secara maksimal sesuai kapabilitas masing-masing.

Namun demikian, setelah kurang lebih 12 tahun berjalan, keberadaan komite sekolah di suatu lembaga pendidikan tidak selalu di fungsikan dengan baik atau tepat dalam melaksanakan peran dan fungsi sebagai mitra sekolah. Akibatnya komite sekolah hanya sebagai pelengkap struktural, komite sekolah juga hanya terlihat saat diadakannya acara-acara yang melibatkan

anak muridnya, jadinya terkesan hanya sebagai tamu undangan yang menghadiri sebuah acara yang diadakan oleh pihak satuan pendidikan. Selain itu komite hanya difungsikan sebagai alat pengumpul dana untuk membiayai program fisik sekolah, komite hanya di libatkan dalam agenda rapat tanpa ikut serta dalam implementasi program sekolah, bahkan tidak mengetahui program yang di jalankan lembaga pendidikan yang menjadi mitranya, sehingga tidak terjadi komunikasi dan pertukaran pemikiran untuk meningkatkan mutu pendidikan antara Kepala Sekolah dan Komite Sekolah di satuan pendidikan tersebut serta tidak dapat mencari solusi terhadap masalah-masalah yang sedang dialami satuan pendidikan. Penyebab yang sering diperbincangkan atas masalah yang terjadi pada Komite Sekolah saat ini adalah adanya “Disfungsi Komite Sekolah”, yang menyebabkan peranan Komite Sekolah sebagai jembatan penyalur aspirasi masyarakat tidak berjalan dengan semestinya, padahal keberadaan dan peran komite sekolah sangatlah penting untuk pengembangan kualitas pendidikan. Maka dari itu, penting untuk melakukan tinjauan ulang terkait peran komite sekolah dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah.

Pelaksanaan manajemen berbasis sekolah perlu diperbaiki dan dibenahi selaras dengan tuntutan kualitas pendidikan yang dilandasi pada kesepakatan, komitmen, kesadaran, dan kesiapan membangun cakrawala budaya baru dan profesionalisme dalam mewujudkan masyarakat sekolah yang penuh loyalitas dan dedikasi tinggi pada peningkatan mutu sekolah.<sup>15</sup> Dengan

---

<sup>15</sup> *Ibid.*,7.

menggendeng keberadaan komite sekolah diharapkan komitmen awal untuk memajukan kualitas pendidikan akan terwujud dalam peningkatan mutu bagi sekolah dan pendidikan nasional.

Disini penulis tertarik untuk meneliti tentang peran komite sekolah dalam implementasi manajemen berbasis sekolah dengan lokasi penelitian di MTs Ma'arif NU Kota Blitar dan SMP Islam Sunan Gunung Jati Ngunut Tulungagung dimana komite sekolah di kedua lembaga ini memiliki peran terhadap pengembangan dan kualitas pendidikan diantaranya dalam bidang akademik maupun non akademik, kurikulum muatan lokal, pengembangan sarana prasarana, penjangkaran aspirasi masyarakat dan peningkatan kompetensi guru.

Pada dasarnya model manajemen berbasis sekolah adalah model pengelolaan pendidikan yang mencoba diterapkan oleh sekolah-sekolah negeri maupun swasta yang bertujuan untuk membangun kualitas pendidikan, tidak terkecuali dengan MTs Ma'arif NU Kota Blitar dan SMP Islam Sunan Gunung Jati Ngunut Tulungagung yang juga telah menggunakan model manajemen berbasis sekolah. Berdasarkan hasil observasi dan survey pendahuluan mengisyaratkan bahwa kedua sekolah tersebut merupakan sekolah yang disiapkan sebagai figur sentral yang menjadi contoh dan menjadi pusat pemberdayaan sekolah, baik negeri maupun swasta. Selain itu kedua sekolah tersebut juga dikembangkan untuk mencapai keunggulan bagi para lulusannya. Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan berbagai perlakuan, baik dalam sistem seleksi calon peserta didik baru, dalam proses

pembelajaran, melengkapi sarana prasarana pendukung yang dibutuhkan peserta didik, serta kurikulum yang selalu berinovasi dalam mengikuti perkembangan zaman.

Hal lain yang peneliti temukan dari observasi pendahuluan adalah kedua sekolah tersebut memiliki ciri khas yang berbeda dengan sekolah menengah tingkat pertama pada umumnya, di antaranya adalah bahwa lembaga pendidikan ini menggunakan sistem pendidikan *full day school* dan *boarding school* dalam mengembangkan karakter siswa berbasis kecerdasan emosional (*emotional intelligence*) dan kecerdasan spiritual (*spiritual intelligence*).

MTs Ma'arif NU Kota Blitar dan SMP Islam Sunan Gunung Jati Ngunut Tulungagung sebagai sekolah swasta sejak awal telah mengembangkan manajemen berbasis sekolah (*Board Base Education*), dimana dalam setiap kebijakan dan pengembangan sekolah senantiasa melibatkan komponen masyarakat. Dengan pendekatan semacam ini sekolah dapat menyelenggarakan pendidikan secara mandiri, Adapun pemerintah (Departemen Agama atau Depdiknas) lebih berperan sebagai *supporting system* dalam upaya peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan.

Sebagai upaya untuk lebih memantapkan pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah ini, maka MTs Ma'arif NU Kota Blitar dan SMP Islam Sunan Gunung Jati Ngunut Tulungagung perlu lebih mempersiapkan diri untuk menyelenggarakan pendidikan secara partisipatif dan inovatif untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan yang dilakukan bersama *stake-*

*holder* oleh seluruh warga sekolah termasuk masyarakat secara kolaboratif dan kooperatif.

Pihak sekolah tidak pernah berjalan sendiri dalam upayanya untuk mencapai tujuan pendidikan sekolah dalam setiap kegiatan, program-program dan pengambilan kebijakan. Komite sekolah berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan dengan memberikan aspirasi-aspirasi serta ide-idenya yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lingkungan sekolah. Berdasarkan hasil wawancara dari salah satu anggota komite sekolah MTs Ma'arif NU Kota Blitar dalam bagian perwakilan atau tokoh masyarakat,<sup>16</sup> bahwasannya terciptanya koordinasi dari masyarakat untuk mensukseskan agenda dari program sekolah, salah satunya adalah dalam acara gema sholat bersama habib syeikh. Masyarakat ikut andil dalam melancarkan agenda tersebut dengan mempersiapkan penataan tempat lokasi, rapat penyusunan panitia serta juru parkir. Selain itu, pada saat peneliti observasi di lapangan, peneliti juga menemukan bahwa di MTs Ma'arif NU Kota Blitar selalu mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler. Dengan wujud peran komite sekolah bersama dengan usaha dan kerja keras para guru, MTs Ma'arif NU Kota Blitar meraih juara di setiap ada lomba di tingkat kabupaten, provinsi bahkan sampai tingkat nasional. Baru-baru ini di MTs Ma'arif NU Kota Blitar mendapatkan perangkat alat musik marching band dan sebuah alat musik gambus. Selain itu, berdasarkan informasi dari salah satu pihak sekolah, lembaga pendidikan tersebut telah mendapatkan tanah wakaf dari

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Ketua RW Bapak H. Imam Sukaji, pada hari minggu tanggal 14 februari 2016.

salah satu warga masyarakat yang tak jauh dari lingkungan sekolah. Dengan kepedulian dari salah satu masyarakat tersebut, terbukti bahwasannya masyarakat ikut andil untuk mendukung dalam pengembangan sekolah serta kualitas pendidikan.

Sementara itu, SMP Islam Sunan Gunung Jati Ngunut Tulungagung adalah lembaga pendidikan islam yang di kelola oleh yayasan pendidikan islam sunan giri di bawah naungan pondok pesantren hidayatul mubtadi'ien. Sekolah tersebut walaupun masih terhitung lembaga pendidikan formal swasta yang masih muda karena tahun berdirinya 1994 dan baru mulai beroperasi tahun 1995 telah mendapatkan akreditasi A. Dengan hasil akreditasi yang telah di dapat, pastilah tak terlepas dari peran komite dan masyarakat untuk meningkatkan layanan dan mutu sekolah. Di saat peneliti observasi pendahuluan, SMP Islam Sunan Gunung Jati Ngunut Tulungagung sedang menjalani pembangunan ruang kelas dan masjid dimana yang berlokasi tak jauh dari kantor pusat SMP Islam Sunan Gunung Jati. Berdasarkan wawancara pendahuluan oleh kepala sekolah, informasi yang di dapat adalah bahwa ketua komite sekolah mengatur dan mencari bagian pekerja tukang bangunan untuk melaksanakan pembangunan ruang kelas dan masjid. Tukang bangunan tersebut lokasi tempat tinggalnya tidak jauh dari sekolah. Hal unik yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara dengan kepala sekolah tersebut, bahwa para pekerja bangunan dengan suka rela membantu pembangunan ruang kelas dan masjid dalam bentuk tenaga *ro'an*. Pembangunan tersebut dilakukan oleh tukang bangunan secara bergilir yang

di atur oleh ketua komite sekolah. Dengan rasa kepedulian yang luar biasa terhadap sekolah tersebut, masyarakat telah berperan untuk mendukung dan melancarkan program pengembangan sekolah.

Dari gambaran tersebut maka peneliti akan banyak melihat fenomena-fenomena yang terjadi langsung di lapangan. Dalam hal ini yang terkait dengan bagaimana kedua lembaga tersebut melaksanakan pengelolaan pendidikan dalam konteks Manajemen Berbasis Sekolah sehingga mampu meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi anak didik.

Melihat begitu penting suatu lembaga pendidikan mengatur diri secara mandiri dengan menggunakan manajemen berbasis sekolah, dan melihat begitu besar peran komite sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan, maka penulis tertarik untuk mengadakan riset dengan judul “Peran Komite Sekolah dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di MTs Ma’arif NU Kota Blitar dan SMP Islam Sunan Gunung Jati Ngunut Tulungagung”. MTs Ma’arif NU Kota Blitar dan SMP Islam Sunan Gunung Jati Ngunut Tulungagung adalah madrasah yang berusaha menerapkan MBS.

## **B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian diatas, penelitian ini akan difokuskan pada peran komite sekolah sebagai badan pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol, dan mediator dalam implementasi manajemen berbasis sekolah.

Adapun fokus penelitian ini akan dijabarkan kedalam pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana peran komite sekolah sebagai badan pemberi pertimbangan dalam implementasi manajemen berbasis sekolah di MTs Ma'arif NU Kota Blitar dan SMP Islam Sunan Gunung Jati Ngunut Tulungagung?
2. Bagaimana peran komite sekolah sebagai badan pendukung dalam implementasi manajemen berbasis sekolah di MTs Ma'arif NU Kota Blitar dan SMP Islam Sunan Gunung Jati Ngunut Tulungagung?
3. Bagaimana peran komite sekolah sebagai badan pengontrol dalam implementasi manajemen berbasis sekolah di MTs Ma'arif NU Kota Blitar dan SMP Islam Sunan Gunung Jati Ngunut Tulungagung?
4. Bagaimana peran komite sekolah sebagai badan mediator dalam implementasi manajemen berbasis sekolah di MTs Ma'arif NU Kota Blitar dan SMP Islam Sunan Gunung Jati Ngunut Tulungagung?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan fokus penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan peran komite sekolah sebagai badan pemberi pertimbangan dalam implementasi manajemen berbasis sekolah di MTs Ma'arif NU Kota Blitar dan SMP Islam Sunan Gunung Jati Ngunut Tulungagung.
2. Untuk mendeskripsikan peran komite sekolah sebagai badan pendukung dalam implementasi manajemen berbasis sekolah di MTs Ma'arif NU Kota Blitar dan SMP Islam Sunan Gunung Jati Ngunut Tulungagung.

3. Untuk mendeskripsikan peran komite sekolah sebagai badan pengontrol dalam implementasi manajemen berbasis sekolah di MTs Ma'arif NU Kota Blitar dan SMP Islam Sunan Gunung Jati Ngunut Tulungagung.
4. Untuk mendeskripsikan peran komite sekolah sebagai badan mediator dalam implementasi manajemen berbasis sekolah di MTs Ma'arif NU Kota Blitar dan SMP Islam Sunan Gunung Jati Ngunut Tulungagung.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian berjudul “Kontribusi Komite Sekolah dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah” ini akan memberikan beberapa kegunaan diantaranya:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang diharapkan dapat memberikan sumbangan akademik berkaitan dengan peran komite sekolah dalam implementasi manajemen berbasis sekolah di lembaga pendidikan umum maupun Islam, lembaga negeri maupun swasta dalam berbagai jenjang pendidikan, utamanya di MTs Ma'arif NU Kota Blitar dan SMP Islam Sunan Gunung Jati Ngunut Tulungagung.

2. Secara Praktis

Temuan ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sumber masukan khususnya:

- a. Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan kontribusi positif dalam mengembangkan peran komite sekolah dalam

implementasi manajemen berbasis sekolah di MTs Ma'arif NU Kota Blitar dan SMP Islam Sunan Gunung Jati Ngunut Tulungagung.

b. Bagi Kepala Sekolah

Hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan kepala sekolah untuk melibatkan komite sekolah dalam pengembangan berbagai program yang dapat meningkatkan implementasi manajemen berbasis sekolah.

c. Bagi Komite Sekolah

Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran kepada komite sekolah terkait dengan perannya di suatu lembaga pendidikan utamanya lembaga pendidikan berbasis manajemen berbasis sekolah.

d. Bagi Perpustakaan Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pembedaharaan kepustakaan sebagai wujud keberhasilan belajar mengajar yang dilakukan oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung serta untuk menambah literatur di bidang pendidikan terutama yang berkaitan dengan peran komite sekolah dalam implementasi manajemen berbasis sekolah.

e. Bagi Peneliti

Dapat memberi pengalaman dan menambah pengetahuan peneliti terhadap peran komite sekolah dalam implementasi manajemen berbasis sekolah.

## E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari persepsi yang salah dalam memahami judul tesis tentang peran komite sekolah dalam proses implementasi manajemen berbasis sekolah ''studi multi kasus di MTs Ma'arif NU Kota Blitar dan SMP Islam Sunan Gunung Jati Ngunut Tulungagung'' maka peneliti perlu memperjelas istilah yang penting dalam judul tesis ini secara konseptual dan operasional. Adapun istilah tersebut sebagai berikut:

### 1. Konseptual

- a. Komite sekolah atau komite madrasah merupakan lembaga nonpolitis dan nonprofit yang dibentuk secara musyawarah dan demokratis oleh *stakeholders* sekolah.<sup>17</sup>
- b. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun dengan cermat dan rinci. Implementasi tidak hanya aktifitas tetapi suatu kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan dengan serius dengan mengacu pada norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>18</sup>
- c. Manajemen berbasis sekolah adalah sebagai pengoordinir dan penyerasian sumberdaya yang dilakukan secara otomatis (mandiri) oleh sekolah melalui sejumlah *input* manajemen untuk mencapai tujuan sekolah dalam kerangka pendidikan nasional, dengan melibatkan

---

<sup>17</sup> Depdiknas, *Panduan Umum Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah*, (Jakarta: Depdiknas), 15.

<sup>18</sup> Nurdin Usma, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: Teras, 2002), 70.

kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan (partisipatif).<sup>19</sup>

## 2. Operasional.

Penegasan secara operasional dari judul “peran komite sekolah dalam implementasi manajemen berbasis sekolah (studi multi kasus di MTs Ma’arif NU Kota Blitar dan SMP Islam Sunan Gunung Jati Ngunut Tulungagung)” adalah mengenai peran komite sekolah dalam implementasi manajemen berbasis sekolah yang meliputi pada peran komite sekolah sebagai badan pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol, dan mediator dalam implementasi manajemen berbasis sekolah di MTs Ma’arif NU Kota Blitar dan SMP Islam Sunan Gunung Jati Ngunut Tulungagung.

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan tesis ini secara teknis mengacu pada buku pedoman penulisan tesis, yang mana tekniknya dibagi menjadi tiga bagian utama yaitu *pertama* bagian awal tesis yang memuat beberapa halaman terletak pada sebelum halaman yang memiliki bab. *Kedua* bagian inti tesis; yang memuat enam bab dengan format (susunan/sistematika) penulisan disesuaikan pada karakteristik pendekatan penelitian kualitatif. Dan *ketiga* bagian akhir tesis meliputi daftar rujukan, lampiran-lampiran yang berisi

---

<sup>19</sup> Sri Minarti, *Manajemen Sekolah: Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 51.

lampiran foto atau dokumen-dokumen lain yang relevan, dan daftar riwayat hidup penulis.<sup>20</sup>

Penelitian ini terdiri dari enam bab, satu bab dengan bab lain ada keterkaitan dan ketergantungan secara sistematis, dengan kata lain pembahasannya berurutan dari bab pertama hingga ke enam. Dengan artian dalam pembacaan tesis ini secara utuh dan benar adalah harus diawali dari bab satu terlebih dahulu, kemudian baru bab ke dua, dan seterusnya secara berurutan hingga bab ke enam.

Sistematika penulisan laporan dan pembahasan tesis yaitu sesuai dengan penjabaran yang dimulai dengan *Bab pertama* yang berisi tentang konteks penelitian, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan. Dalam bab ini secara umum pembahasannya berisi tentang latar belakang atau alasan secara teoritis dari sumber bacaan terpercaya dan keadaan realistik di lokasi penelitian. Dengan demikian disimpulkan bab ini menjadi dasar atau titik acuan metodologis dari bab-bab selanjutnya. Artinya bab-bab selanjutnya tersebut isinya adalah pengembangan teori, yang lebih banyak pada pendukung atau pengokohan sebuah teori yang didasarkan atau diacu pada bab 1 ini sebagai patokan pengembangannya.

Pada *Bab kedua* memuat kajian pustaka, pada bab ini peneliti menjelaskan teori dan konsep dari pakar serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan fokus pertanyaan penelitian. Kajian teori dari penelitian ini

---

<sup>20</sup> IAIN, *Pedoman Penulisan Tesis dan Makalah Program Pascasarjana* (Tulungagung: Pascasarjana 2014), 4.

terdiri dari MBS yang meliputi pengertian MBS, tujuan MBS, karakteristik, dan Implementasi MBS. Selain itu membahas tentang Komite Sekolah yang meliputi Pengertian komite sekolah, tujuan komite sekolah, peran dan fungsi komite sekolah, organisasi komite sekolah, pembentukan komite sekolah, tata hubungan antarorganisasi, serta komponen dan indikator kinerja komite sekolah. Bab ini berisi teori-teori tentang kontribusi komite sekolah dalam implementasi MBS, juga terdapat pembahasan terkait penelitian terdahulu dan paradigma penelitian yang menjadi acuan peneliti dalam melakukan penelitian ini.

Selanjutnya pada *Bab ketiga* merupakan metode penelitian yang mengurai tentang pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian. Lebih jelasnya bab ini adalah penguraian tentang alasan penggunaan penelitian lapangan pendekatan kualitatif, multi kasus, posisi atau peran peneliti di lokasi penelitian, penjelasan keadaan secara konkrit lokasi penelitian, dan strategi penelitian yang digunakan agar dihasilkan penelitian ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan.

Adapun dalam *Bab keempat* berisi pemaparan data-data dari hasil penelitian tentang gambaran umum yang berkaitan dengan pada peran komite sekolah sebagai badan pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol, dan mediator dalam implementasi manajemen berbasis sekolah dalam rangka meningkatkan mutu bidang akademik maupun non akademik pendidikan. Bab

ini memuat tentang paparan temuan penelitian dan data-data yang dianggap penting digali dengan sebanyak-banyaknya, dan dilakukan secara mendalam. Dilanjutkan dengan *Bab kelima* yaitu pembahasan tentang hasil penelitian yang terkait dengan tema penelitian dengan cara penelusuran titik temu antara teori yang sudah di paparkan di bab 1 dan bab 2 yang kemudian dikaitkan dengan hasil penemuan penelitian yang merupakan realitas empiris pada bab 4 dengan digunakan analisis serta pemaknaan sesuai dengan metode pada bab 3. Dengan artian pada bab ini dilakukan pembahasan secara holistik dengan cara menganalisa data dan melakukan pengembangan gagasan yang didasarkan pada bab-bab sebelumnya.

Sebagai bab terakhir yaitu *Bab keenam* adalah penutup yang berisi kesimpulan, implikasi dan saran-saran atau rekomendasi. Bab ini berisi tentang inti sari dari hasil penelitian, kemudian dijabarkan implikasi teoritis dan praktis dari hasil penelitian ini yang ditindak lanjuti dengan pemberian beberapa rekomendasi ilmiah, kemudian dilanjutkan dengan daftar rujukan dan lampiran-lampiran.